

PERANAN SURAT KABAR HARIAN “NASIONAL” PASCA KEMERDEKAAN DI YOGYAKARTA TAHUN 1946-1969

. Oleh: Firman Dwi Lakseta Sujadi, Prodi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, frmnsu@gmail.com

Abstrak

Pada awalnya surat kabar hanya sebagai bacaan saja tetapi kemudian menjadi alat perjuangan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia atau pada masa revolusi fisik ini, surat kabar di Yogyakarta salah satunya Harian Nasional membantu untuk berjuang melawan penjajah Belanda yang datang kembali di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan surat kabar Harian “Nasional” di Yogyakarta tahun 1946-1960. Surat kabar Harian “Nasional” memang bukanlah satu-satunya surat kabar yang ada di Yogyakarta pada waktu itu. Tetapi setiap surat kabar di Yogyakarta tersebut mempunyai peran sendiri-sendiri. Termasuk peranan surat kabar Harian “Nasional” untuk masyarakat Yogyakarta masa revolusi fisik dan pasca revolusi fisik. Oleh karena itu, penelitian ini untuk di khususkan untuk surat kabar Harian “Nasional” di Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah kritis yang terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, heuristik yaitu tahap pencarian dan pengumpulan sumber-sumber sejarah yang relevan. Kedua, verifikasi atau kritik sumber yaitu tahap pengkajian terhadap otentisitas (keaslian) dan kredibilitas (tingkat kebenaran informasi) sumber yang diperoleh baik dari segi fisik dan isi sumber. Ketiga, interpretasi atau penafsiran yaitu tahap pencarian keterkaitan makna yang berhubungan antara fakta-fakta yang telah diperoleh sehingga lebih bermakna. Keempat, historiografi atau penulisan yaitu tahap rekonstruksi peristiwa masa lampau yang tersusun secara sistematis dalam bentuk tulisan sejarah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan surat kabar Harian Nasional di Yogyakarta sangatlah penting. Isi dan juga berita yang dimuat dalam surat kabar ini membantu rakyat Indonesia khususnya di wilayah Yogyakarta dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Isi dan artikel yang termuat dalam surat kabar Harian “Nasional” ini banyak membantu masyarakat khususnya yang berada di wilayah Yogyakarta untuk mengikuti perkembangan Indonesia yang sedang berperang kembali melawan Belanda. Pasca revolusi fisik atau perang kemerdekaan, peranan surat kabar Harian Nasional tidak berhenti. Bergabungnya surat kabar tersebut dengan Partai Nasional Indonesia membuat perannya juga berubah.

Kata Kunci: *Surat kabar, Harian “Nasional”, Yogyakarta.*

THE ROLE OF "NATIONAL" DAILY NEWSPAPER AFTER INDOONESIAN INDEPENDENCE IN YOGYAKARTA DURING 1946-1969

Abstract

Back then newspaper was only for reading but later it became a tool for the Indonesian to struggle in maintaining Indonesia's independence. During the early days of Indonesian independence or during the physical revolution, newspapers in Yogyakarta were used in helping the people against the Dutch invaders, one of them was the “National” Daily Newspaper. The purpose of this study is to determine the role of “National” Daily Newspaper in Yogyakarta in 1946-1960. Although “National” Daily Newspaper was not the only newspaper in Yogyakarta during that time. However, each newspaper in Yogyakarta had its own role. For example, “National” Daily Newspaper’s role which could be seen in the people of Yogyakarta during and after the physical revolution. Therefore, this research focuses on “National” Daily Newspaper in Yogyakarta.

This study applied a critical historical research method which consists of several stages. First, heuristics, it is the stage of finding and collecting relevant historical sources. Second, verification or source criticism which is the stage of assessment of its authenticity and credibility (the truth of information level) sources which is obtained both by physical and content sources. Third, interpretation, a search phase of the related meaning between the obtained facts, thus they are more meaningful. Fourth, historiography or writing

which is the stage of past events reconstruction that are systematically arranged in the form of historical writing.

The results of this study indicate that "National" Daily Newspaper in Yogyakarta plays a crucial role. The contents and the news presented in this newspaper helped the Indonesians, especially the people of Yogyakarta region in fighting and defending Indonesia's independence. Moreover, the contents and articles which were contained in "National" Daily Newspaper helped many people, especially those living in Yogyakarta region, to keep being informed by the development of Indonesia which was back fighting against the Dutch. "National" Daily Newspaper still had an important role even after the physical revolution or the independence war. In addition, the joining of "National" Daily Newspaper with the Indonesian National Party changed its role.

Keywords: *Newspaper, "National" Daily Newspaper, Yogyakarta.*



I. PENDAHULUAN

Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh VOC dan juga pemerintah kolonial membuat rakyat Nusantara menderita, salah satu diantaranya tanam paksa atau *cultuur stelsel*. Tanam paksa yang dilakukan Van Den Bosch pada tahun 1830-1870 telah merenggut jiwa rakyat Nusantara sangat banyak, begitu pula dengan pembuatan jalan Anyer sampai Panarukan yang dilakukan oleh Daendels. Berita-berita atau peristiwa yang sedang berlangsung pada masa tersebut dicetak dalam bentuk surat kabar. Percobaan pertama untuk memulai media massa atau surat kabar cetak resmi ialah pada masa Gubernur Jenderal Van Imhoff yang pada tahun 1744 dengan menerbitkan *Bataviasche Nouvelles*, tetapi hanya dapat hidup untuk dua tahun. Setelah kemunculan *Bataviasche Nouvelles*, perkembangan surat kabar mulai menanjak meskipun masih dikuasai oleh pemerintah kolonial.

Setelah pers Belanda kemudian muncul pers Melayu atau pers lokal. Di Indonesia sendiri perkembangan pers daerah dan berbahasa Melayu terdapat dalam sejarah uraian awal tentang pers di Indonesia oleh E.F.E. Douwes Dekker. Ia menilai kedudukan pers berbahasa Melayu

lebih penting daripada pers Belanda, karena pers itu langsung dapat menarik pembaca-pembaca bumiputera. Oleh karena itu, pers lokal atau pers daerah menjadi ancaman serius bagi pemerintah kolonial, karena dianggap mampu menumbuhkan rasa nasionalisme dan juga mengkritik pemerintahan kolonial Belanda.

Pada masa pendudukan Jepang pers atau media massa cetak mengalami pengawasan yang ketat oleh pemerintah Jepang. Kemudian pemerintah Jepang mengeluarkan UU no. 16. Dua segi yang menonjol dari UU itu ialah berlakunya sistem izin terbit dan sensor preventif.¹ Pasal 1 menyatakan bahwa semua jenis barang cetakan harus memiliki izin publikasi atau izin terbit. Pasal 2 melarang semua penerbitan yang sebelumnya memusuhi Jepang, untuk meneruskan penerbitannya. Ada beberapa media massa surat kabar dan majalah yang tetap terbit di Indonesia. Mereka memang diterbitkan oleh pemerintah Jepang (*Dai Nippon*), seperti *Jawa Shimbun*, *Sumatera Shimbun*, *Borneo Shimbun*, *Celebes Shimbun*, dan *Ceram Shimbun*. Juga *Asia Raya* (Jakarta),

¹Arti kata preventif dalam KBBI adalah bersifat mencegah.

Tjahaja (Bandung), *Sinar Baru* (Semarang), *Sinar Matahari* (Yogyakarta), serta *Suara Asia* (Surabaya). Surat-surat kabar tersebut hanya berisikan berita-berita yang telah disiapkan oleh pemerintah Jepang.²

Pada masa awal kemerdekaan yang juga dikenal sebagai zaman revolusi, surat kabar terbit dengan jumlah halaman yang sungguh tidak menentu, bisa dua atau empat halaman saja. Blokade yang dilakukan oleh kolonial Belanda membuat persediaan bahan baku dalam percetakan surat kabar semakin sulit dan menipis. Tidak jarang terjadi manakala persediaan kertas kebetulan saja habis, *Harian Nasional* terbit dengan menggunakan kertas merang. Perlu diketahui bahwa saat itu ada pula koran yang menggunakan kertas payung.³

Pada hakekatnya pers dan pergerakan rakyat itu adalah satu badan belaka. Maka dari itu keduanya bersama-sama menanggung beban yang berat sekali. Rakyat yang sadar akan kewajibannya mesti mengakui betapa

besar dan faedahnya pers kebangsaan bagi kemajuan dan bagi pergerakannya.⁴ Pers yang sifatnya tertulis dan dapat dibaca berulang-ulang merupakan media yang sangat efektif untuk mempengaruhi dan membangun opini public atau masyarakat.

Oleh karena itu sejak awal pemerintah kolonial Belanda sudah menyediakan perangkat hukum untuk mengendalikan pers.

II. METODE PENELITIAN

Menurut Kuntowijoyo metode sejarah ialah penunjuk teknis tentang bahan, kritik, interpretasi, dan penyajian sejarah.⁵ Metode penelitian sangatlah penting digunakan dalam penulisan sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.⁶

⁴Tim Penulis, *Indonesia dalam Arus Sejarah: Masa Pergerakan Kebangsaan*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2012), hlm. 303.

⁵Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 12.

⁶Louis Gottschalk, "Understanding History", a.b. Nugroho Notosusanto, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 39.

²Ryan Sugiarto, *Mengenal Pers Indonesia*, (Yogyakarta: Insan Madani, 2014), hlm. 51.

³*Ibid.*

Metode penelitian digunakan untuk mengkaji secara runtut urutan peristiwa masa lampau atau peristiwa sejarah. Dalam penelitian ini yang menjadi kajian utamanya atau peristiwa sejarahnya adalah mengenai sejarah dan peranan surat kabar "Harian Nasional" di Yogyakarta pasca kemerdekaan Indonesia yaitu dari tahun 1946 sampai dengan tahun 1969. Metode penelitian meliputi:

1. Heuristik (Pencarian Sumber)

Heuristik merupakan kegiatan pencarian dan pengumpulan sumber-sumber sejarah untuk mendapatkan data atau materi sejarah.⁷ Tahap ini merupakan tahap pertama ketika akan melakukan rekonstruksi sebuah peristiwa sejarah. Dalam heuristic atau pencarian sumber ini dibagi menjadi sumber primer dan juga sumber sekunder.

Sumber primer adalah sumber yang berkaitan langsung dengan peristiwa tersebut dan memberikan informasi yang valid mengenai peristiwa tersebut. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang dapat dijadikan sebagai bahan pendukung atau literatur dari sumber primer. Sumber primer dan

sekunder dapat berupa lisan, tulisan dan benda. Dalam penelitian ini sumber primer berupa arsip:

Arsip Jogja Library Center, *Surat terbuka untuk masyarakat Yogyakarta mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang dimuat di surat kabar Harian "Nasional" tahun 1948.*

Arsip Jogja Library Center, *Berita mengenai perundingan yang dilaksanakan antara delegasi Republik Indonesia dengan delegasi Belanda yang dimuat dalam surat Kabar Harian "Nasional" tanggal 16 April 1948.*

Sumber sekunder adalah sumber yang bukan berasal dari saksi mata (tangan kedua), yaitu seseorang yang tidak menyaksikan peristiwa sejarah secara langsung.⁸ Sumber sekunder yang digunakan dalam antara lain:

Abdurrachman Surjomihardjo (dkk). 1980. *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*. Jakarta: Deppen RI.
Soebagijo I.N. 1980. *Sumanang: Sebuah Biografi*. Jakarta: Gunung Agung.

⁷Heulis Syamsudin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2007), hlm. 67.

⁸Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1982), hlm. 35.

_____. 1981. *Jagat Wartawan Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.

2. Verifikasi (Kritik Sumber)

Kritik sumber merupakan langkah kedua dalam penelitian sejarah atau merekonstruksi sebuah peristiwa sejarah. Kritik Sumber adalah kegiatan menganalisis sumber, untuk mengetahui otentisitas (keaslian sumber) dan kredibilitas (tingkat kebenaran informasi). Kritik sumber sendiri dibedakan menjadi dua bagian yakni, kritik intern dan kritik ekstern.⁹ Kritik eksternal digunakan untuk menilai keabsahan sumber, misalnya jenis kertas, tinta, gaya tulisan, bahasa, dan kalimat untuk mengetahui otentitas sumber.¹⁰ Kritik internal digunakan untuk menilai isi sumber atau validasi data yang terdapat dalam sumber. Dalam kritik sumber kita harus bisa menilai apakah sumber tersebut valid dan dapat digunakan dan termasuk fakta sejarah. Hal ini mengenai asli atau tidaknya sumber-sumber yang telah dikumpulkan sehingga

⁹Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Bentang Budaya, 2005), hlm. 12.

¹⁰Kuntowijoyo, *Penjelasan Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hlm. 101.

isinya benar-benar merupakan fakta sejarah. Fakta adalah data-data yang telah teruji kebenarannya melalui kritik sumber.¹¹ Dalam penelitian ini, kritik sumber berguna untuk menilai bahwa surat kabar Harian “Nasional” memang berperan di wilayah Yogyakarta pada masa perang kemerdekaan dan juga memiliki pengaruh bagi masyarakat di Yogyakarta khususnya ketika berafiliasi dengan Partai Nasional Indonesia (PNI).

3. Historiografi (Penulisan)

Historiografi merupakan tahap akhir dalam penulisan sejarah, pada tahap ini penulis akan menyampaikan hasil penelitian yang telah lengkap, diuji, dan diinterpretasi melalui tulisan. Tahapan menulis sejarah merupakan suatu kegiatan yang dapat dilakukan untuk memahami sejarah. Dalam tahapan ini, sejarawan dituntut untuk mengeluarkan seluruh ide mengenai pengetahuan sejarahnya dengan tidak hanya mengandalkan keterampilannya dalam penggunaan kutipan, namun dengan mengandalkan pikiran-pikiran kritis dan analisisnya.

¹¹A. Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 7

1. Sejarah Persuratkabaran di Indonesia dan Yogyakarta

Setelah bangsa Belanda menginjakkan kaki di Nusantara, mereka mulai menerapkan kebijakan-kebijakan dan membangun pemerintahan. VOC yang pada awalnya bertujuan untuk berdagang rempah-rempah di Indonesia, mulai menerapkan kebijakan-kebijakan yang merugikan dan mengekspansi wilayah Indonesia atau yang bernama Hindia Belanda pada waktu itu. Di antara para Gubernur Jenderal VOC yang memerintah selama tahap yang lebih bersifat ekspansionistis ini, Antonio van Diemen (1636-1645), Johan Maetsuyker (1653-1678), Rijklof van Goens (1678-1681) dan Conellis Janszoon Speelman (1681-1704)-lah yang menonjol, tetapi bukan sebagai contoh kebijakan melainkan lebih sebagai arsitek ekspansi militer VOC.¹² Namun, sebenarnya peletak dasar kekuasaan VOC dan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia adalah Gubernur Jenderal Jan Pieterzoon Coen.

Awalnya, VOC menanamkan kekuasaannya di Ambon, bahkan gubernur

jenderal VOC pertama berdomisili. Tetapi sejak tahun 1609, Gubernur Jenderal J.P. Coen memindahkan kekuasaan VOC dari Ambon ke Jayakarta (Sunda Kelapa), yang sejak tahun 1619 diubah namanya menjadi Batavia. Setelah dipindahkan ke Batavia, J.P. Coen mulai banyak melakukan perkembangan diantaranya dalam bidang pers atau surat kabaran. Dari tahun 1615 – 1644, berita dari Eropa diterima oleh Jan Pieterzoon Coen, setelah berita disusun lalu dikirim ke Ambon yang kemudian menjadi cikal bakal surat kabar pertama.¹³ Dalam tahun 1615, atas perintah Jan Pieterzoon Coen, yang kemudian dalam tahun 1619 menjadi Gubernur Jenderal di Indonesia, diterbitkan “*Memories der Nouvelles*”, yang ditulis dengan tangan.¹⁴ Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa “surat kabar” pertama di Indonesia adalah suatu penerbitan pemerintah Belanda atau VOC.

¹³Samuel Pandjaitan, *Kesaksisan Perdjoengan Pena Koran Soember*, (Jakarta: Yayasan Sumber Agung, 2005), hlm 467.

¹²M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 90.

¹⁴Taufik I., *Sejarah & Perkembangan Pers di Indonesia*, (Jakarta: P. T. TRIYINCO, 1977), hlm. 19.

Menguraikan pers nasional masa penjajahan Belanda sangatlah panjang, karena bertaut dengan sejarah pergerakan bangsa Indonesia. Tumbuhnya perusahaan-perusahaan surat kabar Indonesia, sebenarnya sebagian besar adalah sejalan dengan tumbuhnya kebangkitan nasional Indonesia, yaitu sesudah tahun 1908.¹⁵ Pers bumiputera atau pribumi, walaupun jarang-jarang terbit dan sering dalam keadaan yang tidak menguntungkan, merupakan bagian dari kemerdekaan Indonesia. Pers bumiputera atau surat kabar berbahasa Melayu ini membantu membentuk pendapat umum yang menuju ke arah penghapusan rezim kolonial. Pers bumiputera itu sungguh berjasa dalam usaha meningkatkan kesadaran nasional dan penggunaan satu bahasa, yaitu bahasa dagang Melayu yang sekarang menjadi bahasa Indonesia.

Ketika Jepang datang dan mulai menduduki wilayah Yogyakarta, surat kabar sangatlah sulit untuk berkembang dikarenakan pengontrolan yang sangat ketat. Semua surat kabar dan majalah yang tidak mendapat izin istimewa dilarang

¹⁵Sudaryo Cokrosisworo, *Sekilas Perjuangan Surat Kabar*, (Jakarta: SPS, 1960), hlm. 292.

terbit, pers atau surat kabar dikenakan sensor preventif, Jawa Shinbun Kai adalah suatu badan yang mengawasi surat-surat kabar yang terbit. Surat-surat kabar baik itu pers Indonesia, Tionghoa maupun Melayu dan juga Belanda dihentikan semuanya. Koran atau surat kabar berbahasa Jawa seperti Sedyo Tama di Yogyakarta diperkenankan untuk terbit, tetapi harus menggunakan Bahasa Indonesia.¹⁶ Oleh karena itu, persuratkabaran atau pers yang terbit pada masa penjajahan Jepang ini sangatlah sedikit.

Kedatangan kembali Belanda ke Indonesia dan menduduki wilayah Yogyakarta dan sekitarnya, maka perusahaan penerbitan media cetak juga terganggu. Informasi dan juga isi yang mengkritik pemerintahan Belanda yang datang kembali ke Indonesia membuat Belanda geram. Meskipun dengan peralatan yang sangat sederhana dan administrasi tidak memadai mereka tetap menerbitkan surat kabar dan tetap eksis. Sebagai institusi sosial yang membentuk

¹⁶Tashadi, *Buku Kenangan 50 Tahun Republik Indonesia di Yogyakarta: Sebuah Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Panitia Gabungan Peringatan HUT ke-50 Kemerdekaan RI Bhakti Pertiwi, 1995), hlm. 48.

opini publis, surat kabar- surat kabar di Yogyakarta memiliki visi dan misi yang khas selain membantu dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Termasuk dua surat kabar di Yogyakarta yang terbit pasca kemerdekaan yaitu surat kabar “Kedaulatan Rakdjat” dan juga surat kabar Harian “Nasional”. Hal ini bisa diketahui dari sajian berita utama, analisa berita, tajuk rencana, catatan pojok ataupun karikatur yang ditampilkan jika ada untuk menkritik pemerintah dan masyarakat.¹⁷

2. Berdirinya Surat Kabar Harian “Nasional” dan Pengaruhnya di Yogyakarta

Sejarah berdirinya surat kabar Harian “Nasional” bermula pada masa penjajahan Jepang atau Indonesia belum merdeka, ketika Sumanang yang merupakan Kepala Bagian Pers/Pendidikan di Kantor Besar *Putera* (Pusat Tenaga Rakyat) berpikir bahwa revolusi tidak mungkin tanpa adanya sebuah surat kabar. Sumanang merupakan seorang tokoh pergerakan dan wartawan

yang banyak makan asam garamnya perjuangan Indonesia. Selain sebagai salah seorang pendiri kantor berita Antara bersama dengan Adam Malik, Sipatuhar, dan Pandu Kartawiguna beliau juga pernah menjadi wartawan dan pimpinan redaksi *Pemandangan* dan pimpinan umum *Asia Raya*.¹⁸

Berdirinya penerbitan surat kabar Harian “Nasional” di pusat ibukota Jakarta menjadi perhatian kolonial Belanda yang datang kembali ke Indonesia. Surat kabar atau koran-koran dipandang dapat membangkitkan semangat nasionalisme rakyat Indonesia semakin berkobar. Disamping itu, dengan adanya surat kabar atau koran juga dapat menyebarkan informasi-informasi penting perkembangan yang sedang terjadi di Indonesia. Oleh sebab itu kolonial NICA/Belanda yang melancarkan serangan militernya membatasi hal tersebut dengan mengurangi atau menutup penerbitan-penerbitan yang ada, salah satu

¹⁷Suhartinah Sudijono, *Peranan Surat Kabar pada Masa Revolusi 1945-1950 di Yogyakarta*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2007, hlm. 44.

¹⁸Ambar Adrianto, dkk. *Peranan Media Massa Lokal bagi Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Daerah*, (Yogyakarta: Direktorat Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 1997), hlm. 171.

yang terkena dampak adalah penerbitan surat kabar Harian “Nasional” di Jakarta. Oleh karena itu, mereka harus pindah ke wilayah aman yaitu di Yogyakarta.

Penerbitan surat kabar Harian “Nasional” akhirnya diputuskan untuk pindah di wilayah Yogyakarta yang sekiranya aman untuk melakukan penerbitan tanpa ada gangguan dari kolonial Belanda pada waktu itu. Pada masa revolusi tersebut, sedikit demi sedikit pasukan Republik (*elite politik*) mulai banyak yang meninggalkan ibukota Jakarta. Apa lagi waktu itu, disebarkan berita, bahwa Jakarta tidak boleh dijadikan tempat pertempuran tetapi hendaknya dijadikan kota diplomasi. Oleh karena itu, sebagian besar kaum Republik lalu mulai memutuskan untuk meninggalkan ibukota Jakarta, kembali ke daerah, masuk ke pedalaman meneruskan perjuangan dari sana. Demikian pula dengan Sumanang dan kawan-kawan untuk memutuskan pindah juga ke Yogyakarta dalam mengusahakan penerbitannya.

Pada mulanya, surat kabar harian umum “Nasional” didirikan oleh Mr. Sumanang pada tanggal 15 November 1946 dengan Badan Penerbitan “Nasional” yang beralamat di Jalan

Tanjung No.21 Yogyakarta.¹⁹ Oleh karena itu, pada tanggal tersebut diperingati sebagai tanggal lahirnya surat kabar Harian “Nasional” di Yogyakarta. Surat kabar Harian “Nasional” tersebut mengambil nama “Nasional” dikarenakan berangkat dari dorongan perlunya meningkatkan semangat nasionalisme di awal kemerdekaan Indonesia.²⁰ Pasca kelahirannya di Yogyakarta, surat kabar Harian “Nasional” bukan hanya satu-satunya surat kabar lokal di Yogyakarta, melainkan ada juga surat kabar Kedaulatan Rakyat yang sudah terbit dahulu bahkan beberapa minggu setelah Indonesia menyatakan merdeka.

Perlu diketahui juga Penerbitan “Nasional” bukanlah satu satunya penerbitan yang ada pada tahun 1946. Di tahun tersebut ketika Yogyakarta menjadi ibukota sementara dikarenakan kondisi di Jakarta yang tidak aman, penerbit-penerbit surat kabar sangatlah banyak di Yogyakarta, jumlah penerbit harian mencapai sepuluh penerbitan, antara lain *Suara Ibu Kota*, *Aldjihat* dan lain

¹⁹Ambar Adrianto, dkk., *op. cit.*, hlm. 170.

²⁰Harian Bernas, Senin, 16 November 2015.

sebagainya. Tak lupa ada juga *Kedaulatan Rakyat* yang sudah terbit dahulu. Akhirnya satu persatu penerbitan surat kabar tersebut gulung tikar dan hanya tinggal harian *Kedaulatan Rakyat* dan *Harian "Nasional"*. Perjuangan koran-koran atau surat kabar tersebut juga sangatlah penting dalam membantu perjuangan Indonesia khususnya di wilayah Yogyakarta.

Lika-liku perjalanan surat kabar *Harian "Nasional"* di Yogyakarta pasca kemerdekaan Indonesia dan juga pasca revolusi juga sangatlah panjang. Surat kabar *Harian "Nasional"* berganti-ganti nama seiring dengan berjalannya tahun. Surat kabar *Harian "Nasional"* tersebut pernah berganti nama setidaknya sampai tiga kali yaitu, "*Sulindo* atau *Suluh Indonesia*" edisi Yogyakarta kemudian "*Suluh Marhaen*" ketika berafiliasi dengan *Partai Nasional Indonesia (PNI)*. Kemudian pada masa Orde baru berganti nama lagi menjadi "*Berita Nasional*" atau sering disingkat *Bernas*. Dengan adanya kebijaksanaan Menteri Penerangan lewat Surat Keputusan Menteri tertanggal 26 Maret 1965 No. 29/SK/M/65, yang kemudian disempurnakan melalui Surat Keputusan No. 112/SK/M/1965 tahun 1965, yang menyatakan bahwa setiap

penerbitan harus berafiliasi (sebagai anggota/cabang) dari partai politik atau organisasi massa anggota front nasional atau panca tunggal, maka surat kabar *Harian "Nasional"* Yogyakarta bergabung dengan PNI.²¹

Pada masa awal cetak, surat kabar *Harian Nasional* ini banyak memberitakan tentang kejadian-kejadian penting yang terjadi. Berita-berita yang dijadikan headline surat kabar tersebut adalah informasi yang penting bagi masyarakat khususnya masyarakat Yogyakarta. Misalnya saja berita tentang perundingan-perundingan yang terjadi antara Republik Indonesia dengan pihak Belanda.. Dengan adanya berita tersebut masyarakat yang berada di wilayah-wilayah pedalaman dapat mengetahui tentang peristiwa yang sedang terjadi dan bila ada suatu tanda bahaya, masyarakat bisa bertindak secepatnya.

Pada masa revolusi fisik, surat kabar-surat kabar khususnya diluar wilayah ibukota seperti Yogyakarta selain memunculkan berita mengenai kemerdekaan Indonesia juga mengungkap peristiwa lain. Perlu diketahui bahwa

²¹Ambar Adrianto, dkk.,
loc. cit., hlm. 172.

sekitar tahun 1945-1948 akhir ada tiga isu masalah yang menjadi sorotan hampir setiap surat kabar khususnya di wilayah Yogyakarta, yakni:

1. Kehadiran kembali orang Belanda dengan membonceng tentara NICA untuk menjajah kembali Indonesia.
2. Kebijakan politik diplomasi Sutan Syahrir untuk tetap mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
3. Berdirinya negara-negara boneka seperti Negara Pasundan, Negara Indonesia Timur yang merusak keutuhan serta kekuatan negara Republik Indonesia.²²

Perjuangan surat kabar yang terbit pada masa revolusi fisik ini khususnya surat kabar Harian "Nasional" layak mendapatkan apresiasi. Dalam perjuangannya ikut membantu menyebarkan semangat nasionalisme di Yogyakarta dan mempertahankan kemerdekaan serta sebagai sarana komunikasi. Surat kabar Harian "Nasional" selain membakar semangat nasionalisme rakyat Yogyakarta, juga sebagai sarana pengumuman untuk rakyat

Yogyakarta. Pengumuman penting seperti rakyat Yogyakarta berkumpul untuk bersatu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang sudah dicapai.

Surat kabar Harian "Nasional" kemudian bergabung atau berafiliasi dengan Partai Nasional Indonesia ketika pemerintah waktu itu mengeluarkan kebijakan atau aturan baru kepada setiap penerbit surat kabar yang ada di Indonesia. Menteri Penerangan Indonesia mengeluarkan SK yang mengharuskan surat kabar-surat kabar harus berafiliasi dengan suatu organisasi massa atau partai politik. Pada waktu itu sebenarnya surat kabar Harian "Nasional" ingin bersikap netral. Surat kabar Harian "Nasional" yang berdiri pada 15 November 1946 dan semula berhaluan netral tidak bisa dipungkiri dalam perkembangan selanjutnya berafiliasi dengan Partai Nasional Indonesia (PNI).²³

Dengan bergabungnya surat kabar Harian "Nasional" dengan Partai Nasional Indonesia, maka nama surat kabar dari Harian "Nasional" pun juga harus diubah. Hal ini juga dikarenakan ideologi dari surat kabar Harian "Nasional" yang netral menjadi nasionalis mengikuti ideologi

²²Suhartinah Sudijono, *op. cit.*, hlm. 35.

²³*Ibid.*, hlm. 41.

partai. Oleh karena itu surat kabar Harian “Nasional” diubah nama menjadi “Suluh Indonesia”. Surat kabar “Suluh Indonesia” ini mempunyai *tagline* “Untuk Kesatuan Rakyat dan Bangsa”. Surat kabar “Suluh Indoensia” ini menjadi alat perjuangan bagi organisasi partai politik PNI dalam kepentingannya.

Isi dan juga berita yang termuat dalam surat kabar “Suluh Indonesia” hampir semua kolom artikelnya di isi dengan berita mengenai Partai Nasional Indonesia. dalam kolom artikel tersebut juga mengajak para pembaca surat kabar “Suluh Indonesia” untuk mengikuti ajaran Marhaen yang di cetuskan oleh Soekarno. Di samping juga ajakan untuk mengikuti ajaran marhaenisme yang menjadi ideologi dari Partai Nasional Indonesia, berita mengenai berbagai dukungan tokoh-tokoh politik terhadap PNI juga banyak dimuat di dalam surat kabar “Suluh Indonesia”.²⁴

Nama “Suluh Indonesia” atau biasa disingkat “Sulindo” tidak lah bertahan lama. Nama “Suluh Indonesia” edisi Yogyakarta, sejak 1 Juni 1966 berganti nama baru yakni “Suluh

Marhaen”.²⁵ Perubahan nama menjadi “Suluh Marhaen” ini tidak merubah segala sesuatu isi yang termuat dalam surat kabarnya. Surat kabar ini masih tetap menjunjung kepentingan Partai Nasional Indonesia dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Kolom-kolom artikel dan juga berita yang termuat dalam surat kabar “Suluh Marhaen” edisi Yogyakarta ini, juga masih memberitakan tentang peristiwa-persitiwa yang berkaitan dengan Partai Nasional Indonesia (PNI).

Pada masa Orde Baru surat kabar banyak yang dibredel atau dikurangi. Hal ini berkaitan dengan surat kabar tersebut adalah pers komunis. Pelarangan terbit surat kabar ini menyebabkan kevakuman pers yang berperan sebagai *counter* opini/propaganda/ informasi pers komunis dan pers simpatisan-simpatisannya.²⁶ Pers atau surat kabar yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia dan juga simpatisannya dilarang terbit oleh pemerintahan Orde Baru. Dalam perkembangan selanjutnya dengan adanya SK No.01/PER/MENPEN/1969 yang

²⁴Suluh Indonesia, 25 Februari 1966.

²⁵Ambar Adrianto, dkk., *loc. cit.*

²⁶Akhmad Zaini Akbar, *Kisah Pers Indonesia 1966-1974*, (Yogyakarta: LKiS, 1995), hlm. 53.

mencabut segala macam ketentuan mengenai perusahaan pers, termasuk mengenai ketentuan afiliasi dengan partai politik maka Suluh Marhaen edisi Yogyakarta berganti nama menjadi “Berita Nasional” atau Harian Umum “Bernas”.²⁷ Dengan begitu berakhir sudah afiliasi Partai Nasional Indonesia dengan surat kabar Harian “Nasional” di Yogyakarta.

III. Kesimpulan

Persuratkabaran sudah lama muncul di Indonesia sejak masa penjajahan pertama kolonial Belanda. Pada awalnya surat kabar tersebut fungsinya sebagai catatan pemerintahan kolonial Belanda. Seiring berkembangnya surat kabar tersebut kemudian menjadi bacaan orang-orang Belanda atau Eropa yang berada di Hindia Belanda (Indonesia sebelum merdeka). Oleh karena itu masyarakat pribumi kemudian membuat surat kabar juga tetapi menggunakan bahasa lokal atau melayu pada waktu itu. Isi dari surat kabar yang diterbitkan oleh masyarakat pribumi tersebut mengandung paham-paham nasionalis sehingga dianggap berbahaya oleh pemerintah

kolonial Belanda. Surat kabar-surat kabar tersebut kemudian dilarang terbit oleh pemerintah kolonial Belanda.

Pada masa penjajahan Jepang, surat kabar di Indonesia juga sangat sulit untuk berkembang, bahkan pada masa penjajahan Jepang ini, kebijakan mengenai penerbitan surat kabar lebih ketat dari pada masa penjajahan Belanda. Pemerintah Jepang membentuk sebuah badan lembaga sensor dimana setiap surat kabar yang akan terbit harus melalui badan sensor tersebut. Isi dan juga berita yang akan terbit harus disaring terlebih dahulu mana berita yang boleh diterbitkan atau berita yang mengancam pemerintahan Jepang. Oleh karena itu pada masa penjajahan Jepang, surat kabar Indonesia sangatlah sedikit sekali yang beroperasi dan terbit.

Kemudian pasca kemerdekaan Indonesia, surat kabar di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat. Pada masa ini, kebebasan pers sangatlah bebas dan tanpa tekanan. Perkembangan surat kabar yang juga masuk ke wilayah Yogyakarta juga sangat pesat. Di Yogyakarta pada masa revolusi fisik atau pasca kemerdekaan ada dua surat kabar yang peranannya sangat penting dalam membantu perjuangan rakyat Indonesia

²⁷Ambar Adrianto, dkk., *loc. cit.*

mempertahankan kemerdekaan Indonesia yaitu surat kabar “Kedaulatan Rakyat” dan juga surat kabar Harian “Nasional”.

Surat kabar harian “Nasional” sendiri merupakan surat kabar yang didirikan oleh Sumanang. Dalam pendirian surat kabar Harian Nasional ini juga sangatlah berat, bahkan dalam proses pendiriannya salah satu anggota pendiri yaitu Soebrata harus gugur. Penerbitan surat kabar ini harusnya dilakukan di ibukota Jakarta, tetapi karena keadaan ibukota pada waktu itu yang sedang kacau karena ulah tentara Belanda/NICA, maka dipindahkan di wilayah yang sekiranya aman yaitu di Yogyakarta,

Surat kabar Harian Nasional ini sangatlah besar peranannya dalam masa perang kemerdekaan di Yogyakarta. Artikel-artikel dan juga semangat nasionalisme yang dijunjung oleh surat kabar ini dapat membakar semangat rakyat Indonesia khususnya di wilayah Yogyakarta dalam membantu mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajah Belanda yang datang kembali. Informasi-informasi yang diberikan surat kabar ini juga dapat membantu masyarakat Yogyakarta dalam mengikuti perkembangan yang sedang terjadi pada masa revolusi fisik tersebut.

Seiring dengan perkembangannya dan pasca masa revolusi surat kabar Harian Nasional ini kemudian bergabung atau berafiliasi dengan partai politik. Hal ini disebabkan karena pemerintah melalui Menteri Penerangan mengeluarkan SK yang berisi bahwa setiap penerbitan atau surat kabar untuk berafiliasi dengan suatu organisasi massa atau partai politik. Surat kabar Harian Nasional yang waktu itu dipimpin oleh Sumanang yang merupakan anggota dari Partai Nasional Indonesia, kemudian berafiliasi dengan PNI tersebut. Ketika surat kabar Harian Nasional tersebut bergabung dengan partai yang berideologi nasionalis serta marhaenisme tersebut nama surat kabar pun ikut dirubah. Surat kabar yang awalnya bernama Harian Nasional kemudian dirubah menjadi Suluh Indonesia, tidak berapa lama kemudian diganti menjadi Suluh Marhaen mengikuti pusat.

Dalam peranannya semenjak bergabung dengan Partai Nasional Indonesia inipun juga berubah. Dulu ketika masa revolusi fisik peranan surat kabar Harian Nasional adalah membantu dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, tetapi setelah bergabung dengan PNI maka surat kabar ini menjadi alat perjuangan partai tersebut dalam

menyebarkan ajaran ideologinya. Disamping itu, isi dari surat kabar Suluh Marhaen banyak menampilkan berita-berita yang berkaitan dengan PNI. Setelah masa Orde Baru, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan mengenai penerbitan surat kabar. Bahwa surat kabar

yang terbit di Indonesia tidak lagi harus berafiliasi dengan partai politik atau organisasi massa. Oleh karena itu surat kabar Suluh Marhaen berganti nama menjadi Bernas atau Berita Nasional.

Daftar Pustaka

Buku-buku:

- Ambar Adrianto (dkk), *Peranan Media Massa Lokal Bagi Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Daerah*, Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1997.
- Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2012.
- Heulis Syamsudin, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2007.
- Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.
- _____, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Bentang Budaya, 2005.
- _____, *Penjelasan Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.
- Louis Gottschalk, "Understanding History", a.b. Nugroho Notosusanto, *Mengerti Sejarah*, Jakarta: UI Press, 2008.
- Ricklefs, Merle Calvin, *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1991.
- Ryan Sugiarto, *Mengenal Pers Indonesia*, Yogyakarta: Insan Madani, 2014.
- Samuel Pandjaitan, *Kesaksian Perdjoengan* Pena: Koran Soember, Jakarta: Yayasan Sumber Agung, 2005.
- Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1982.
- Soebagijo I.N., *Sumanang: Sebuah Biografi*, Jakarta: Gunung Agung, 1980.
- _____, *Jagat Wartawan Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung, 1981.
- Sudaryo Cokrosisworo, *Sekilas Perjuangan Surat Kabar*, Jakarta: SPS, 1960.
- Suhartinah Sudijono, *Peranan Surat Kabar pada Masa Revolusi 1945-1950 di Yogyakarta*, Yogyakarta: Kepel Press, 2007.
- Taufik I., *Sejarah & Perkembangan Pers di Indonesia*, Jakarta: PT. Triyinco, 1977.
- Tashadi, *Buku Kenangan 50 Tahun Republik Indonesia di Yogyakarta: Sebuah Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Panitia Gabungan Peringatan HUT ke-50 Kemerdekaan RI Bhakti Pertiwi, 1995.
- Tim Penulis, *Indonesia dalam Arus Sejarah: Masa Pergerakan Kebangsaan*,

Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve,
2012.

Suluh Marhaen, 19 Agustus 1966,
"Batjalah"

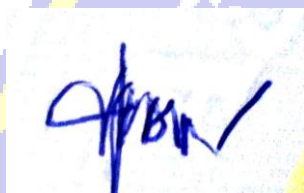
Surat Kabar:

Harian Bernas, 16 November 2015, "Cita-
cita Harian Bernas".

Suluh Marhaen, 21 Agustus 1966,
"Instruksi DPP PNI/FM"

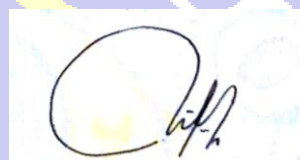
Yogyakarta, November 2018

Pembimbing,



Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M. Ag
NIP. 19620321 198903 1 001

Reviewer,



Dr. Miftahuddin, M.Hum
NIP. 19740302 200312 1 006

